

ROBOHNYA PILAR PENOPANG PELAYANAN PUBLIK

Dadang Trisasongko

Secretary-General TI Indonesia

www.ti.or.id



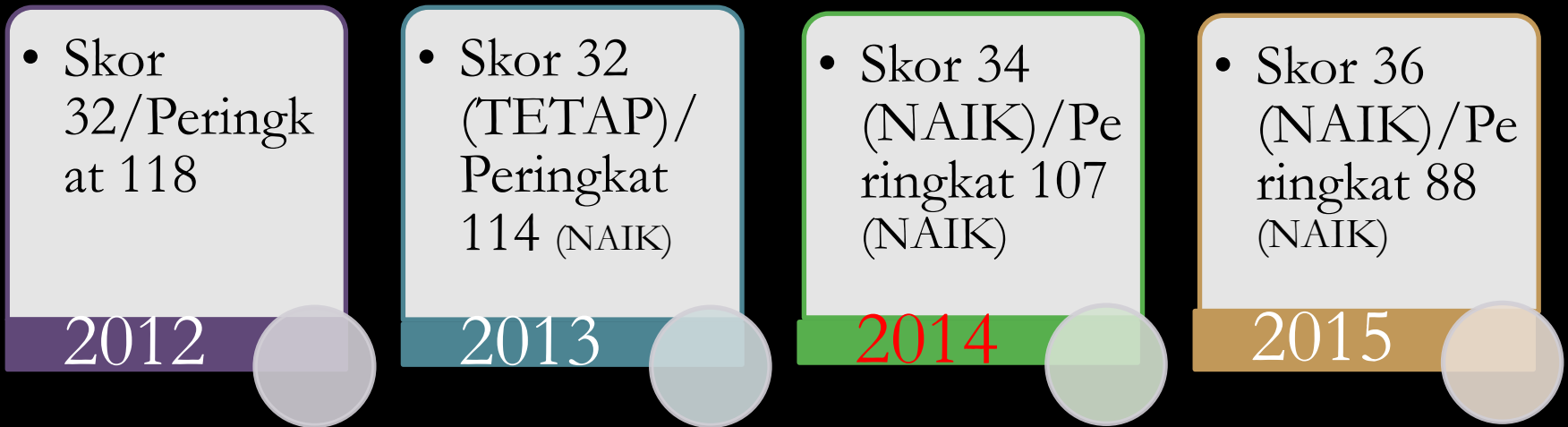
ROBOHNYA PILAR PENOPANG PELAYANAN PUBLIK

Dadang Trisasongko
Secretary-General TI Indonesia
www.ti.or.id

Kurang-Lebih Rp. 250 TRILYUN/tahun
atau setara dengan 10% APBN

“Uang hasil kejahatan di Indonesia
(ngemplang pajak, korupsi, *drugs*,
trafficking, *illegal logging* dll) dilarikan ke
luar negeri melalui sistem keuangan global”

Skor & Peringkat Meningkat, tapi korupsi masih sistemik

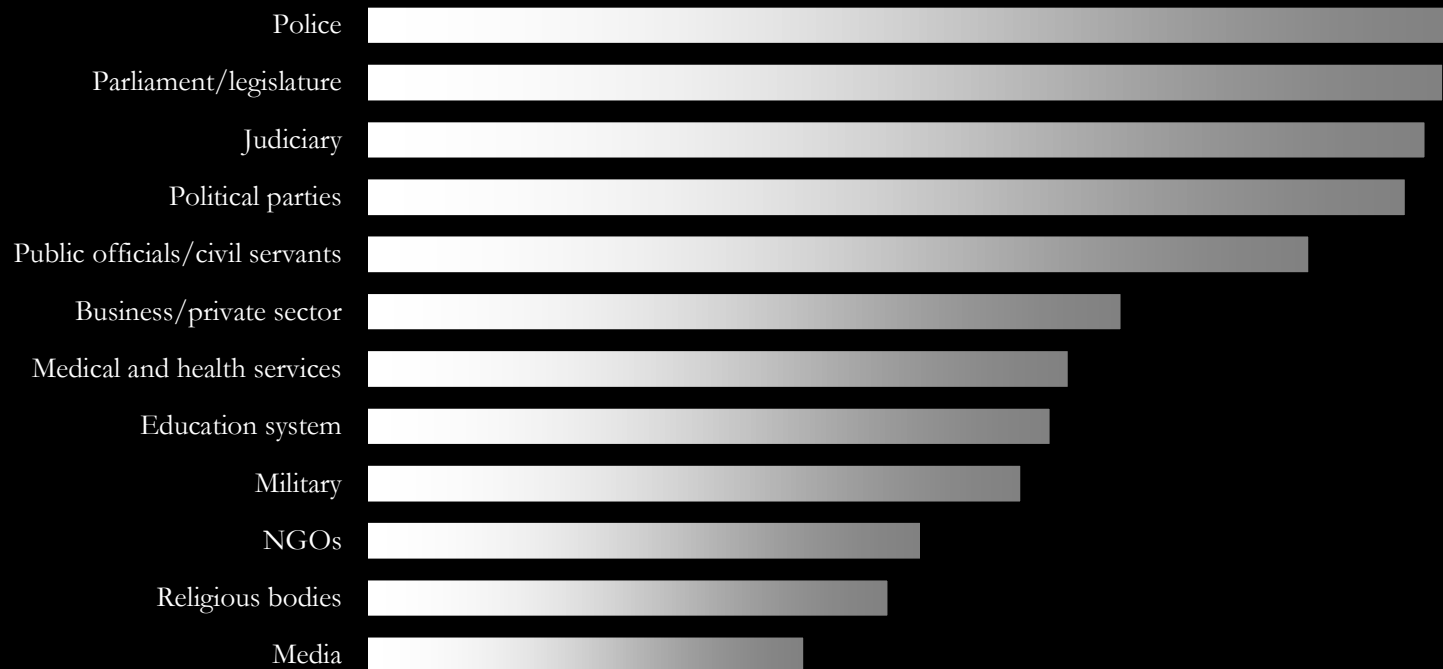


**Skor naik 2 poin,
Peringkat naik 19 tingkat**

Penyebab Rendahnya Skor CPI Indonesia

Lembaga-lembaga peradilan masih menjadi alat impunitas karena masih maraknya Praktik Korupsi – Suap Menyuar di Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum.

RAWAN SUAP: Lembaga Penegak Hukum, Birokrasi Pemerintah, Lembaga Politik



Fenomena *State Captured Corruption (SCP)* sebagai *Massive Silent Killing*

SCP adalah modus korupsi paling sistematis dengan jumlah yang masif melalui pembajakan sistem demokrasi dan hukum yang berlaku

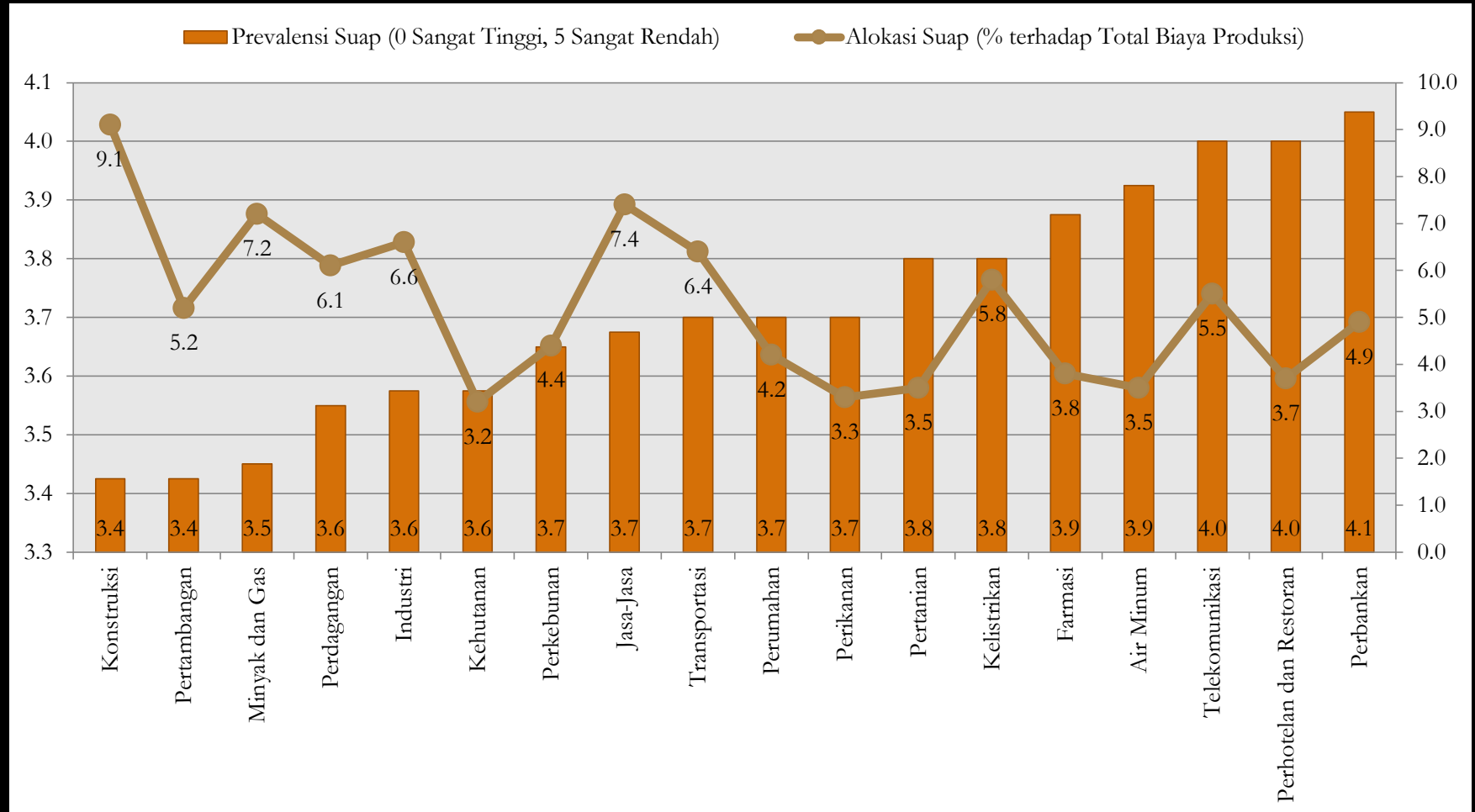
Korupsi dan Kemampuan Negara dalam Memenuhi dan Melindungi Hak Asasi Manusia

- “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” (Alinea IV UUD 1945)

“Korupsi Sebagai Penghambat Kemudahan Berusaha”

*Ini membuktikan bahwa korupsi bukan sebagai
pelicin ekonomi*

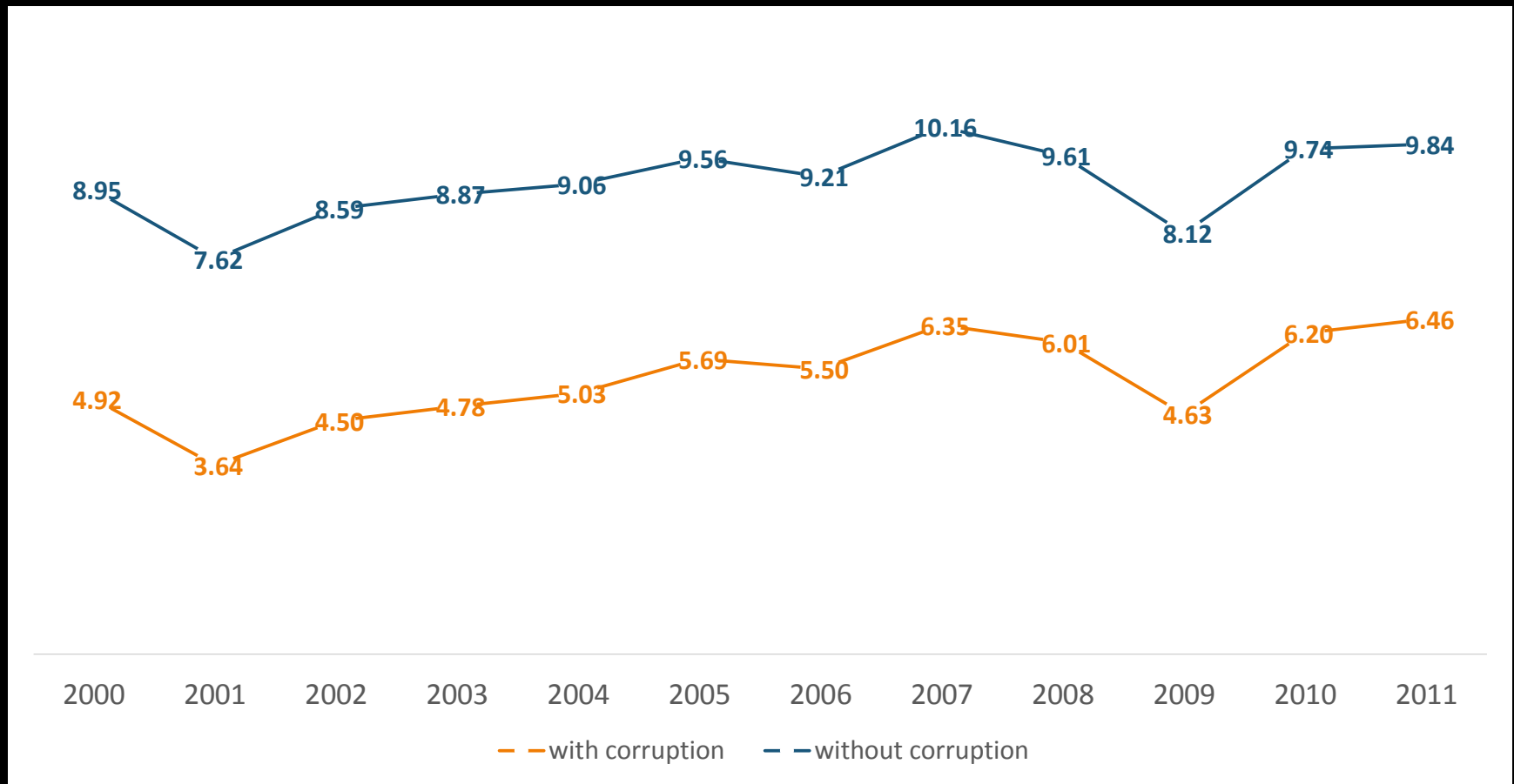
Prevalensi dan Nilai Alokasi Suap (Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha)



“Perekonomian Daerah Kehilangan Momentum Untuk Tumbuh Lebih Besar”



Pertumbuhan ekonomi elasticity = 0.545*, Mo (2000)



*) Dampak kenaikan 1 poin CPI terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah mengontrol berbagai variabel penentu lainnya

Dikutip dari Arief Ansory Yusuf, 2015

“Mayoritas Pengusaha
Setuju Untuk
Mengembangkan *Corporate
Liability*”

*68% responden bertanggung jawab terhadap
pemberantasan korupsi*

“Belum semua perusahaan telah punya kode etik yang melarang praktik pelanggaran integritas (termasuk gratifikasi)”

“Hanya, sebagian pengusaha memiliki kebijakan, sistem, dan laporan publik”

dtrisasongko@ti.or.id

www.ti.or.id

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

